



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 124 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023;
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) diubah ...;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 337);
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 117).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- 6.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman oleh Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 4

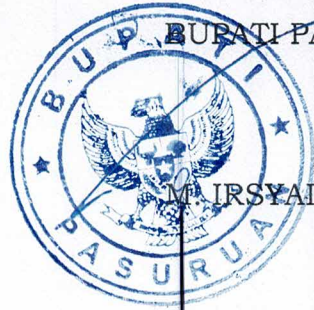
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 5 Agustus 2022

BUPATI PASURUAN,



MAIRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 5 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PASURUAN,



AKHMAD KHASANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 124
TANGGAL : 05 AGUSTUS 2022

LAMPIRAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

- I . DINAS PENDIDIKAN
- II . DINAS KESEHATAN
- III . DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
- IV . DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
- V . SATPOL – PP
- VI . BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
- VII . DINAS SOSIAL
- VIII . DINAS KETENAGAKERJAAN
- IX . DINAS KP3AP2KB
- X . DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
- XI . DINAS SUMBER DAYA AIR , CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
- XII . DINAS LINGKUNGAN HIDUP
- XIII . DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
- XIV . DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
- XV . DINAS PERHUBUNGAN
- XVI . DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- XVII . DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
- XVIII . DINAS PERIKANAN
- XIX . DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
- XX . DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- XXI . DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
- XXII . DINAS PARIWISATA
- XXIII . DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
- XXIV . DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
- XXV . SEKRETARIAT DAERAH
- XXVI . BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
- XXVII . BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
- XXVIII . BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
- XXIX . SEKRETARIAT DPRD
- XXX . INSPEKTORAT

- XXXI . KECAMATAN GEMPOL
- XXXII . KECAMATAN BEJI
- XXXIII . KECAMATAN BANGIL
- XXXIV . KECAMATAN REMBANG
- XXXV . KECAMATAN KRATON
- XXXVI . KECAMATAN POHJENTREK
- XXXVII . KECAMATAN GONDANG WETAN
- XXXVIII . KECAMATAN WINONGAN
- XXXIX . KECAMATAN REJOSO
- XL . KECAMATAN GRATI
- XLI . KECAMATAN LEKOK
- XLII . KECAMATAN NGULING
- XLIII . KECAMATAN SUKOREJO
- XLIV . KECAMATAN PASREPAN
- XLV . KECAMATAN KEJAYAN
- XLVI . KECAMATAN WONOREJO
- XLVII . KECAMATAN PANDAAN
- XLVIII . KECAMATAN PRIGEN
- XLIX . KECAMATAN PURWOSARI
- L . KECAMATAN PURWODADI
- LI . KECAMATAN LUMBANG
- LII . KECAMATAN PUSPO
- LIII . KECAMATAN TOSARI
- LIV . KECAMATAN TUTUR
- LV . BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK





RENCANA KERJA (RENJA)

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023**



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : 2022

**RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. setiap OPD wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA berpedoman pada renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat Daerah merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang disusun dengan tahapan dan tatacara sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 merupakan wujud tindak lanjut upaya penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai pada tahun 2000 telah mendorong Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk selalu meningkatkan kinerjanya demi mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good governance) sebagai paradigma baru dalam manajemen pembangunan merupakan ciri yang harus ada dalam sistem administrasi publik.

Dengan demikian good governance adalah pelayanan publik yang efisien, sistem yang handal serta pemerintahan yang akuntabel terhadap publik. Agar paradigma tersebut dapat terwujud diperlukan pengawasan dengan kemampuan pemantapan kualitas dari atribut- atribut yang spesifik dari sistem tata kelola.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah memandang perlu untuk meningkatkan manajemen perencanaan dalam bentuk penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023.

Pengawasan dapat berperan dalam meyakinkan sejauhmana hal-hal tersebut telah terwujud dan diterapkan. Sehingga manfaat paling awal dari pengawasan internal yang baik bahwa dapat mengumpulkan informasi perkembangan perwujudan dari masing masing atribut tersebut. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pengawasan mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam perwujudan good governance.

Rencana kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2023 memuat indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada satuan kerja yang bersangkutan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan otonomi luas kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan

pengawasan.

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana seringkali tidak mendapat perhatian yang optimal sebagaimana fungsi perencanaan, pengendalian maupun pelaksanaan suatu kegiatan. Hal tersebut terjadi karena selama ini ada anggapan bahwa pengawasan itu merepotkan, mencari-cari kesalahan/kelemahan, sudah ada unit kerja yang menangani dan lain-lainnya. Sementara itu dalam pelaksanaannya pengawasan meliputi pemeriksaan, pengendalian, evaluasi maupun pembinaan terkait dengan proses prosedur dan rencana pelaksanaan tugas pada setiap satuan kerja.

Pengawasan tidak hanya digunakan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pengawas pemerintah dalam rangka penghimpun/menemukan informasi untuk menguji dan menilai kelayakan pelaksanaan kegiatan dan atau laporan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah tetapi juga untuk menilai :

1. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,
2. Efisiensi dan kehematan dalam penggunaan sumber daya Untuk pelaksanaan kegiatan organisasi (OPD),
3. Efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sementara itu di lain pihak bilamana setiap kegiatan, tidak dilakukan pengendalian kemungkinan terjadinya penyimpangan dan ketidak tepatan cukup signifikan, mengingat pengendalian sebagai alat atau bagian dari kegiatan pengawasan berperan mendeteksi deviasi atau kekurangan yang menjadi umpan balik suatu kegiatan mulai perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

Demikian pula suatu kegiatan pengawasan tanpa adanya program dan rencana kerja akan menghasilkan kinerja yang tidak tepat baik sasaran maupun tujuannya sehingga indikator kinerja yang terdiri atas input, output, outcome, benefit maupun dampak tidak terpantau secara cermat.

1.2. Landasan Hukum

- 1.2.1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 1.2.2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 1.2.3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional 2005-2025;

- 1.2.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 1.2.5. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- 1.2.6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 1.2.7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 1.2.8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 1.2.9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 1.2.10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
- 1.2.11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
- 1.2.12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 1.2.13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 1.2.14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

- 1.2.15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/4641/2021 Tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
- 1.2.16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.2.17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
- 1.2.18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan 2018-2023;
- 1.2.19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
- 1.2.20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan. Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah;
- 1.2.21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- 1.2.22. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
- 1.2.23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 adalah memberikan arah penyelenggaraan program kegiatan pengawasan untuk jangka waktu satu tahun mendatang dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten tahun 2023 adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
2. Digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program kegiatan pengawasan;
3. Memberikan landasan kebijakan taktis strategis dan arah yang jelas bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam mencapai tujuan organisasi;
4. Menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah, penjelasan mengenai sistematika penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menjelaskan Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat Daerah, Analisa kinerja pelayanan, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja, Program dan Kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan Program dan Kegiatan yang akan dicapai termasuk kebutuhan pendanaanya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut input, output, outcomes.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Renstra

Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target hasil / keluaran yang direncanakan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Target kinerja (outcomes) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% dan realisasi kinerja 100% (capaiannya 100 %), dengan realisasi capaian anggaran 94,98%. Adapun pelaksanaan kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target kinerja (output) 100% dan realisasi kinerja 100% (tercapai 100%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 79,89%, terdapat efisiensi anggaran sebesar 20,11%. Adapun sub kegiatannya yaitu :

1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan target kinerja 4 laporan dan realisasi kinerja 4 laporan (tercapai 100%), realisasi capaian anggaran sebesar 79,89%.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan target kinerja (output) 100% dan realisasi kinerja 100% (tercapai 100%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 96,49%, terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,51%. Adapun sub kegiatannya yaitu :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 14 bulan dan realisasi kinerja 14 bulan (tercapai 100%), realisasi capaian anggaran sebesar 96,27%.

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan target kinerja 13 bulan dan realisasi kinerja 13 bulan (tercapai 100%), realisasi capaian anggaran sebesar 99,91%.

3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan target kinerja 12 bulan dan realisasi kinerja 12 bulan (tercapai 100%), realisasi capaian anggaran sebesar 78,96%.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan target kinerja (output) 100% dan realisasi kinerja 100% (tercapai 100%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 78,96%, terdapat efisiensi anggaran sebesar 21,04%. Adapun sub kegiatannya yaitu :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan target kinerja 41 stel dan realisasi kinerja 41 stel (tercapai 100%), realisasi capaian anggaran sebesar 98,39%.
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan target kinerja 6 orang dan realisasi kinerja 6 orang (tercapai 100%), realisasi capaian anggaran sebesar 44,23%.
 - 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan target kinerja 50 orang dan realisasi kinerja 50 orang (tercapai 100%), realisasi capaian anggaran sebesar 96,17%.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan target kinerja (output) 100% dan realisasi kinerja 100% (tercapai 100%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 90,93%, terdapat efisiensi anggaran sebesar 9,07%. Adapun sub kegiatannya yaitu :
- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 41 stel dan realisasi kinerja 41 stel (tercapai 100%), realisasi capaian anggaran sebesar 98,39%.
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja 57 jenis-kali dan realisasi kinerja 57 jenis-kali (tercapai 100%), realisasi capaian anggaran sebesar 97,66%.
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 14 jenis-kali dan realisasi kinerja 14 jenis-kali (tercapai 100%), realisasi capaian anggaran sebesar 94,82%.
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja 36 jenis-bulan dan realisasi kinerja 36 jenis-bulan (tercapai 100%), realisasi capaian anggaran sebesar 99,26%.
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja 100 orang-kali dan realisasi kinerja 100 orang-kali (tercapai 100%), realisasi capaian anggaran sebesar 91,03%.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan target kinerja (output) 100% dan realisasi kinerja 100% (tercapai 100%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 90,81%, terdapat efisiensi anggaran sebesar 9,19%. Adapun sub kegiatannya yaitu :
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 68 surat dan realisasi kinerja 68 surat (tercapai 100%), realisasi capaian anggaran sebesar 71,84%.
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 6 rekening dan realisasi kinerja 6 rekening (tercapai 100%), realisasi capaian anggaran sebesar 91,03%.

- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan target kinerja (output) 100% dan realisasi kinerja 100% (tercapai 100%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 95,54%, terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,46%. Adapun sub kegiatannya yaitu :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja 60 unit-kali surat dan realisasi kinerja 70 unit-kali (tercapai 117%), realisasi capaian anggaran sebesar 94,54%.
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja 50 unit-kali dan realisasi kinerja 56 unit-kali (tercapai 112%), realisasi capaian anggaran sebesar 99,97%

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Target kinerja (outcomes) Program Penyelenggaraan Pengawasan 84% dan realisasi kinerja 84% (capaiannya 100 %), dengan realisasi capaian anggaran 85,16%. Adapun pelaksanaan kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan target kinerja (output) 84% dan realisasi kinerja 84% (tercapai 100%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 88,07%, terdapat efisiensi anggaran sebesar 11,93%. Adapun sub kegiatannya yaitu :
- 1) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan target kinerja 75 Obrik dan realisasi kinerja 75 Obrik (tercapai 100%), realisasi capaian anggaran sebesar 92,36%.
 - 2) Reviu Laporan Kinerja, dengan target kinerja 57 laporan dan realisasi kinerja 57 laporan (tercapai 100%), realisasi capaian anggaran sebesar 71,59%.
 - 3) Reviu Laporan Keuangan, dengan target kinerja 116 laporan dan realisasi kinerja 116 laporan (tercapai 100%), realisasi capaian anggaran sebesar 41,38%.
 - 4) Kerjasama Pengawasan Internal, dengan target kinerja 15 kali dan realisasi kinerja 20 kali (tercapai 133%), realisasi capaian anggaran sebesar 81,49%.
 - 5) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, dengan target kinerja 3 kali dan realisasi kinerja 3 kali (tercapai 100%), realisasi capaian anggaran sebesar 43,79%.

- b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan target kinerja (output) 84% dan realisasi kinerja 84% (tercapai 100%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 43,79%, terdapat efisiensi anggaran sebesar 56,21%. Adapun sub kegiatannya yaitu :
 - 1) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, dengan target kinerja 10 kali dan realisasi kinerja 21 kali (tercapai 100%), realisasi capaian anggaran sebesar 43,79%.
- 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, dengan target kinerja (outcomes) Program Penyelenggaraan Pengawasan 100% dan realisasi kinerja 100% (capaiannya 100 %), dengan realisasi capaian anggaran 47,75%. Adapun pelaksanaan kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pendampingan dan Asistensi, dengan target kinerja (output) 100% dan realisasi kinerja 100% (tercapai 100%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 47,75%, terdapat efisiensi anggaran sebesar 52,25%. Adapun sub kegiatannya yaitu :
 - 1) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, dengan target kinerja 34 laporan dan realisasi kinerja 34 laporan (tercapai 100%), realisasi capaian anggaran sebesar 50,00%.
 - 2) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, dengan target kinerja 1 laporan dan realisasi kinerja 1 laporan (tercapai 100%), realisasi capaian anggaran sebesar 45,50%.

Terkait target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021 pada Inspektorat Daerah telah tercapai 100%, bahkan ada yang melebihi target. Untuk penyerapan anggaran secara keseluruhan sebesar 91,04%.

Meskipun terdapat beberapa permasalahan dalam pemenuhan target kinerja, namun kami mencoba mengatasinya dengan keterbatasan waktu, SDM dan anggaran yang kami miliki. Akan tetapi kedepannya dibutuhkan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut agar tidak terulang kembali ditahun berikutnya dan dapat dilaksanakan secara maksimal.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022 (tahun berjalan) sebagaimana tabel T-C.29.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2020										
1	PRROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	300%	300%					300%	100
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya dana pembayaran jasa komunikasi, air, listrik setiap bulan	6 Rekening	6 Rekening					6 Rekening	100
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya dana pembayaran jasa administrasi keuangan	14 Jabatan	14 Jabatan					14 Jabatan	100
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	59 Jenis	59 Jenis					59 Jenis	100
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 Paket	2 Paket					2 Paket	100
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 Paket	2 Paket					2 Paket	100
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan Makanan & Minuman	3 Paket	3 Paket					3 Paket	100
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	450 Org/kali	450 Org/kali					450 Org/kali	100
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Negeri	Terlaksananya perjalanan luar negeri	5 org	5 org					5 org	100

9	Penyediaan Jasa Perkantoran	Terlaksananya penyediaan jasa perkantoran & terbayar -nya honorarium Non PNS	13 Org/ bln	13 Org/ bln									13 Org/ bln	100
10	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim melalui jasa pengiriman	100 pucuk surat/berkas	512 pucuk surat/berkas									512 pucuk surat/berkas	51,2
11	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembayaran pajak kendaraan	15 unit	15 unit									15 unit	100
12	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah barang yang diasuransikan	14 unit	14 unit									14 unit	100
13	Penyediaan pakaian kerja	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas khusus Inspektorat	100 stel	100 stel									100 stel	100
2	POGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Prosentase sarana prasarana aparatur yang memenuhi syarat terhadap sarpras yang tersedia	300%	300%									300%	100
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya pengadaan perlengkapan kantor (10 Printer, 10 Komputer, 1 speaker portabel, Korden kain, 1 AC Portabel, 1 pemotong kertas)	24 unit	25 unit									25 unit	104,16667
2	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan gedung/kantor	2 unit	2 unit									2 unit	100
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	15 unit	15 unit									15 unit	100
4	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung/kantor	1 Paket	1 Paket									1 Paket	100
5	Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelair	Terpeliharanya barang Meubelair	1 Paket	1 Paket									1 Paket	100
6	Pengadaan Mobil Jabatan	Terpenuhinya pengadaan kendaraan dinas pejabat	1 unit	1 unit									1 unit	100
7	Pengadaan kendaraan dinas Operasional	Terpenuhinya pengadaan kendaraan dinas operasional	2 unit	2 unit									2 unit	100
3	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Prosentase LHP tepat waktu dan tindak lanjut atas rekomendasi	80%	80%									80%	100

1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Tercapainya pemeriksaan pada obyek pemeriksaan (obrik)	75 Obrik	75 Obrik								75 Obrik	100
2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Terlaksananya penyelesaian jumlah penanganan kasus pengaduan dan pendampingan kasus	10 laporan	10 laporan								10 laporan	100
3	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya frekuensi koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	4 kali	4 kali								4 kali	100
4	Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK) / Pencegahan & Pemberantasan Korupsi	Terealisasinya Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK)	4 laporan	4 laporan								4 laporan	100
5	Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	Terlaksananya sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar	36 kali	36 kali								36 kali	100
6	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya SDM Aparatur Inspektorat	180 orang	140 orang								140 orang	77,77778
7	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah tenaga yang mengikuti Bintek, PKS, Penjenjangan pejabat fungsional, penilaian angka kredit dan FGD	16 kali	1 kali								1 kali	6,25
8	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Laporan PMRB Kab dan Reviu PMPRB OPD	34 laporan	34 laporan								34 laporan	100
9	Penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	ZI berpredikat WBK	1 laporan	1 laporan								1 laporan	100
10	Penanganan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	Sosialisasi dan penilaian maturitas SPIP	10 OPD	10 OPD								10 OPD	100
11	Monitoring, Evaluasi dan Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monev Fisik Proyek, Hibah/Bansos, Dana BOS dan JKN	4 laporan	4 laporan								4 laporan	100
12	Rapat Kerja / FGD PKS APIP, APH dan OPD	Terlaksanaannya Rapat Kerja / FGD	3 kali	4 kali								4 kali	133,33333
13	Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi	Terealisasinya Korsupgah KPK dan Monitoring Center for Prevention (MCP)	12 kali	12 kali								12 kali	100
14	Survey indeks persepsi korupsi	Terlaksananya survey Indeks persepsi korupsi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi								1 Rekomendasi	100

[illegible]

2021, 2022, 2023										
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
60101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah	100%		100%	100%	100	100%	200%	200,00
60101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	100%		100%	100%	100	100%	200%	200,00
6010120106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang tersusun	4 laporan		4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	8 laporan	200,00
60101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan	100%		100%	100%	100	100%	200%	200,00
6010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dana gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	36 orang/bulan		14 bulan	14 bulan	100	36 Orang/bulan	50 Orang/bulan	138,89
6010120202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honorarium Non PNS yang terbayar	13 dokumen		13 bulan	13 bulan	100	13 Dokumen	26 Dokumen	200,00
6010120203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Honorarium pengelolaan keuangan daerah yang terbayar	12 dokumen		12 bulan	12 bulan	100	12 Dokumen	24 Dokumen	200,00
60101205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian	100%		100%	100%	100	100%	200%	200,00
6010120502	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		41 stel	41 stel	100	0 Paket	41 Paket	4100,00
6010120509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang		6 orang	6 orang	100	9 Orang	15 Orang	30,00
6010120511	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		50 orang	50 orang	100	50 Orang	100 Orang	200,00
60101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum	100%		100%	100%	100	100%	200%	200,00
6010120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	2 Paket		28 jenis	28 jenis	100	2 Paket	30 Paket	1500,00

6010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor, makanan dan minuman yang tersedia	8 Paket		57 jenis-kali	57 jenis-kali	100	8 Paket	65 Paket	812,50
6010120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 Paket		14 jenis-kali	14 jenis-kali	100	2 Paket	16 Paket	800,00
6010120606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	12 Dokumen		36 jenis-bulan	36 jenis-bulan	100	12 Dokumen	48 Dokumen	400,00
6010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	24 Laporan		100 orang-kali	179 orang-kali	179	24 Laporan	203 Laporan	845,83
60101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100%		0%	0%	0	0%	0%	0,00
6010120705	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit		0 unit	0 unit	0	0 unit	0 unit	0,00
6010120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit		0 unit	0 unit	0	2 unit	2 unit	33,33
6010120710	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit		0 unit	0 unit	0	0 unit	0 unit	0
60101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang	100%		100%	100%	100	100%	200%	200,00
6010120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim melalui jasa pengiriman	12 Laporan		68 surat	68 surat	100	12 Laporan	80 Laporan	666,67
6010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik setiap bulan	12 Laporan		6 rekening	6 rekening	100	12 Laporan	18 Laporan	150,00
60101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan	100%		100%	100%	100	100%	200%	200,00
6010120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		60 unit-kali	70 unit-kali	116,67	15 Unit	85 Unit	566,67
6010120905	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit		0 unit	0 unit	0	0 unit	0 unit	0,00

6010120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 unit-kali	56 unit-kali	112	50 Unit	106 Unit	212,00
60101209009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 unit	0 unit	0	0 unit	0 unit	0,00
60102	PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN	Persentase LHP tepat waktu dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi	87%		84%	84%	100	85%	169%	194,25
60102201	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah LHP dan LHE tepat waktu dan tindak lanjut atas Rekomendasi	87 Laporan		84 Laporan	84 Laporan	100	85 Laporan	85 Laporan	97,70
6010220101	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	57 Laporan		0 laporan	0 laporan	0	0 Laporan	0 Laporan	0,00
6010220102	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	75 Laporan		75 laporan	75 laporan	100	75 Laporan	150 Laporan	200,00
6010220103	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan		57 LHR	57 LHR	100	2 Laporan	59 Laporan	2950,00
6010220104	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	116 Laporan		116 LHR	116 LHR	100	116 Laporan	232 Laporan	200,00
6010220105	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	24 Laporan		0 laporan	0 laporan	0	0 Laporan	0 Laporan	0,00
6010220106	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan		20 kali	20 kali	100	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	100,00
6010220107	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 Dokumen		3 laporan	3 laporan	100	5 Dokumen	8 Dokumen	160,00
60102202	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase terlaksananya pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%		100%	100%	100	100%	200%	200,00
6010220201	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3 Laporan		0 laporan	0 laporan	0	0 laporan	0 laporan	0,00
6010220202	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6 Laporan		10 kali	21 kali	210	6 laporan	27 laporan	450,00

60103	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Terpenuhiya Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang memadai	100%		100%	100%	100	100%	200%	200,00
60103202	Pendampingan dan Asistensi	Persentase LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	80%		55%	55%	100	65%	65%	81,25
6010320202	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	57 perangkat daerah		34 laporan	34 laporan	100	57 Perangkat Daerah	91 Perangkat Daerah	159,65
6010320203	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 perangkat daerah		1 laporan	1 laporan	100	1 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	200,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018 maupun Renja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja.

Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya pada masing-masing indikator kinerja sasaran, dan juga dengan cara membandingkan antara realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun sebelumnya. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat secara rinci diuraikan pada Lampiran 4.

Pengukuran Kinerja Tahun 2021, terhadap sasaran maupun target indikator kinerja akan diuraikan sebagai berikut :

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sudah mencapai target. Adapun perolehan data realisasi kinerja dari target kinerja sasaran di atas adalah :

1. *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*

Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD Dengan Nilai Minimal BB pada Tahun 2021 ini meningkat. Target kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2021 Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah yang berkategori minimal BB sebesar 55% atau sebanyak 28 Perangkat Daerah. Sedangkan realisasi tahun 2021 nilai evaluasi implementasi SAKIP PD yang berkategori BB keatas sebesar 87,50% atau sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Perangkat Daerah. Sehingga dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja sebesar 159%. Jika dilihat dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 yaitu **55%**, capaian tersebut **sudah memenuhi target**.

2. *Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP*

Tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP didefinisikan sebagai kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturasi ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturasi sistem pengendalian intern. SPIP harus dibangun pada setiap tingkatan dan jenjang birokrasi, dengan harapan akan memberikan jaminan kualitas kinerja pada keseluruhan tingkatan dan jenjang birokrasi, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP dimana kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengukuran tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP ini bukan sekedar pencapaian target kinerja, tetapi lebih pada mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pedoman ini memberikan panduan untuk memperbaiki penyelenggaraan SPIP, memuat langkah-langkah minimal yang harus dilakukan. Perlu digaris bawahi bahwa setiap organisasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga mungkin diperlukan cara-cara atau strategi lain yang berbeda untuk mencapai penyelenggaraan SPIP yang optimum. Untuk mewujudkan SPIP yang kuat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan pencapaian nilai maturitas yang meningkat setiap tahunnya. Tahun ini kami melakukan evaluasi terhadap Perangkat Daerah yang telah

menerapkan SPIP secara efektif yang mendukung peningkatan maturitas SPIP di Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan. Ini menjadi langkah besar bagi kami untuk dapat melakukan pengendalian internal sebagai upaya meminimalisir permasalahan yang terjadi untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.

Pada Indikator Kinerja **Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif** ini, kami menentukan target sebesar **12%**, adapun realisasinya adalah sebesar **19,30%**. Jika dilihat dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 yaitu **12%**, capaian tersebut **sudah memenuhi target**.

3. *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*

Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2021 ini meningkat dari yang sebelumnya A dengan Skor 81,11 menjadi A dengan Skor **82,92**. Jika dilihat dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 yaitu **82,00**, capaian tersebut **sudah memenuhi target**.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Persentase Kategori Hasil Evaluasi Sakip OPD Dengan Nilai Minimal BB			55%	65%	70%	75%	87,50%	-	65%	70%	75%	
2.	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif			12%	35%	48%	50%	19,30%	-	35%	48%	50%	
3.	Nilai SAKIP OPD (Inspektorat Daerah)			82	83	84	85	82,92	-	83	84	85	

Tabel 2.2
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase Kategori Hasil Evaluasi Sakip OPD Dengan Nilai Minimal BB	%	30	33,92	113,06%	30	35,71	119,03%	30	58,92	196,4%
2.	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Inspektorat Daerah)	%	70	71,92	102,74%	71	72,34	101,88	80	81,11	101,38%

Alokasi Anggaran terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran Tahun 2021	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase Kategori Hasil Evaluasi Sakip OPD Dengan Nilai Minimal BB	Rp. 10.612.449.890,-	Rp. 9.661.148.615,-	91,04
2.	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif			
3.	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Inspektorat Daerah)			

Skala Predikat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3.	66 % ≤ 75 %	Sedang
4.	51% - 65 %	Rendah
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Inspektorat Kabupaten Pasuruan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Suatu isu strategis bagi Inspektorat Kabupaten Pasuruan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Inspektorat Kabupaten Pasuruan di masa lima tahun mendatang.

Faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut :

Faktor Kekuatan :

1. Tersedianya Peraturan terkait pelaksanaan tupoksi pengawasan
2. Tersedianya SDM yang berkompeten
3. Tersedianya anggaran, sarana dan prasana untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan
4. Adanya komitmen aparatur pengawasan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN, dengan membuka ruang koordinasi dan konsultasi.

Faktor Kelemahan :

Belum idealnya distribusi pemeranan jabatan dalam Tim pembinaan dan pengawasan

Masih banyaknya tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang belum tuntas.

Faktor Tantangan :

1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN.
2. Tuntutan terhadap percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
3. Tuntutan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan target nilai minimal A, dengan catatan seluruh Perangkat Daerah harus dievaluasi oleh APIP.
4. Tuntutan Kinerja yang optimal, dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan oleh APIP.

5. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh Perangkat Daerah.
6. Sebagian Perangkat Daerah belum memahami pelaksanaan / Implementasi SAKIP.

Faktor Peluang :

1. Adanya komitmen pemimpin/ Kepala daerah yang tercermin dalam RPJMD.
2. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi atau pendampingan dengan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
3. Tersedianya jaringan SIKD dalam mendukung pelaporan, penyerapan/ realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.

Dari faktor-faktor diatas, Inspektorat Daerah mengangkat beberapa isu strategis, antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN.
2. Peningkatan Pelaksanaan implementasi SAKIP oleh seluruh Perangkat Daerah.
3. Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
4. Peningkatan terhadap Kapabilitas APIP.

Hasil pengawasan masih digunakan sebagai tindakan koreksi dan belum merupakan masukan untuk upaya preventif sehingga masih dijumpai kesalahan berulang dari tahun ke tahun. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atau pengendalian internal di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Dalam rumusan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 sudah berpedoman pada Rancangan Awal RKPD berdasarkan P-RPJMD.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspektorat Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah	<u>100%</u>	7.016.964.732	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspektorat Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah	<u>100%</u>	7.016.964.732	
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase tersedianya laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi	100%	113.014.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase tersedianya laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi	100%	113.014.000	
1.1.1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	113.014.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	59760	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan	100%	5.518.748.672	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan	100%	5.518.748.672	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/bulan	5.188.436.100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/bulan	5.188.436.100	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat Daerah	Jumlah dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	13 dokumen	247.158.496	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat Daerah	Jumlah dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	13 dokumen	247.158.496	

1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	83.154.076	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	83.154.076	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian	100%	316.112.760	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian	100%	1.338.225.000	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat Daerah	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	23.002.760	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat Daerah	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	23.002.760	
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat Daerah	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 Orang	71.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat Daerah	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 Orang	71.000.000	
1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis/Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	222.110.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis/Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	222.110.000	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum	100%	450.498.300	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum	100%	450.498.300	
1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Daerah	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	30.916.720	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Daerah	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	30.916.720	
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Daerah	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8 Paket	212.077.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Daerah	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8 Paket	212.077.400	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	79.880.680	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	79.880.680	
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	9.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	9.600.000	
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	118.023.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	118.023.500	

1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100%	73.700.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100%	73.700.000	
1.5.1	Pengadaan Mebel	Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	10 unit	24.200.000	Pengadaan Mebel	Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	10 unit	24.200.000	
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 unit	49.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 unit	49.500.000	
1.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang disediakan	0 unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang disediakan	2 unit	-	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang	100%	127.461.900	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang	100%	127.461.900	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	2.010.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	2.010.000	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	12 Laporan	125.451.900	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	12 Laporan	125.451.900	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan	100%	417.429.100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan	100%	417.429.100	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Inspektorat Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 Unit	294.698.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Inspektorat Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 Unit	294.698.400	
1.7.2	Pemeliharaan Mebel	Inspektorat Daerah	Jumlah mebel yang dipelihara	0 Unit	-	Pemeliharaan Mebel	Inspektorat Daerah	Jumlah mebel yang dipelihara	0 Unit	-	
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 Unit	46.426.200	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 Unit	46.426.200	
1.7.4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	76.304.500	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	76.304.500	

2.	PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN	Pemda Kabupaten Pasuruan	Persentase LHP tepat waktu dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi	87%	3.846.735.480	PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN	Pemda Kabupaten Pasuruan	Persentase LHP tepat waktu dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi	87%	3.846.735.480	
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah LHP dan LHE tepat waktu dan tindak lanjut atas Rekomendasi	87 Laporan	3.789.920.480	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah LHP dan LHE tepat waktu dan tindak lanjut atas Rekomendasi	87 Laporan	3.789.920.480	
2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja pemerintah daerah	57 Laporan	81.100.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja pemerintah daerah	57 Laporan	81.100.000	
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	75 Laporan	2.915.922.500	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	75 Laporan	2.915.922.500	
2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	55.800.000	Reviu Laporan Kinerja	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	55.800.000	
2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	116 Laporan	45.700.000	Reviu Laporan Keuangan	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	116 Laporan	45.700.000	
2.1.5	Pengawasan Desa	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan Desa	24 Laporan	15.840.000	Pengawasan Desa	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan Desa	24 Laporan	15.840.000	
2.1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1 Kesepakatan	655.867.980	Kerjasama Pengawasan Internal	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1 Kesepakatan	655.867.980	
2.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 Dokumen	19.690.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 Dokumen	19.690.000	
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pemda Kabupaten Pasuruan	Persentase terlaksananya pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	56.815.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pemda Kabupaten Pasuruan	Persentase terlaksananya pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	56.815.000	
2.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	3 Laporan	19.690.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	3 Laporan	19.690.000	
2.2.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	6 Laporan	37.125.000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	6 Laporan	37.125.000	

3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pemda Kabupaten Pasuruan	Persentase Terpenuhinya Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang memadai	100%	27.225.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pemda Kabupaten Pasuruan	Persentase Terpenuhinya Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang memadai	100%	27.225.000	
3.1	Pendampingan dan Asistensi	Pemda Kabupaten Pasuruan	Persentase LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	80%	27.225.000	Pendampingan dan Asistensi	Pemda Kabupaten Pasuruan	Persentase LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	80%	27.225.000	
3.1.1	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	57 perangkat daerah	14.850.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	57 perangkat daerah	14.850.000	
3.1.2	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penegakan Integritasi	1 perangkat daerah	12.375.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penegakan Integritasi	1 perangkat daerah	12.375.000	
	JUMLAH				10.890.925.212	JUMLAH				10.890.925.212	

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat

Pada pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 untuk penyusunan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat usulan dari masyarakat dan tidak terdapat usulan Inspektorat Daerah yang secara transparan tercantum dalam program kegiatan untuk masyarakat karena sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 26 ayat (4) Inspektorat Kab/Kota melakukan kegiatan pengawasan terhadap :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kab/Kota;
- b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Sedangkan program kegiatan yang terkait dengan masyarakat telah diakomodasi melalui kegiatan penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah. Terkait dengan uraian diatas serta berorientasi pada isu-isu penting diantaranya penanganan pengaduan masyarakat yang belum optimal, disebabkan keterbatasan sumber daya aparatur yang dapat berpengaruh terhadap kualitas pengawasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka program dan kegiatan tahun 2023 telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN	Pemda Kabupaten Pasuruan	Persentase LHP tepat waktu dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi	87%	
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah LHP dan LHE tepat waktu dan tindak lanjut atas Rekomendasi	87 Laporan	
2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja pemerintah daerah	57 Laporan	
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	75 Laporan	
2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	
2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	116 Laporan	
2.1.5	Pengawasan Desa	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan Desa	24 Laporan	
2.1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1 Kesepakatan	
2.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 Dokumen	
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pemda Kabupaten Pasuruan	Persentase terlaksananya pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	
2.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	3 Laporan	
2.2.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	6 Laporan	
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pemda Kabupaten Pasuruan	Persentase Terpenuhinya Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang memadai	100%	
3.1	Pendampingan dan Asistensi	Pemda Kabupaten Pasuruan	Persentase LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	80%	
3.1.1	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	57 perangkat daerah	
3.1.2	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pemda Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi,	1 perangkat daerah	

			Verifikasi, Penegakan Integritasi		
--	--	--	--------------------------------------	--	--

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seperti telah diketahui bahwa Pemerintah Pusat sekarang ini sedang menggalakkan penegakan hukum terhadap praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yang mendorong partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsive terhadap aspirasi masyarakat, penetapan kebijakan publik berdasarkan konsensus dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif dan efisiensi, akuntabel, dan bebas KKN adalah hal-hal yang menjadi target Pemerintah untuk dicapai.

Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan tugas Inspektorat yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah maka Inspektorat mempunyai kewajiban untuk :

1. Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi melalui sistem koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana.
2. Melaksanakan pengawasan dalam rangka mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan
3. Meningkatkan kualitas pengawasan agar lebih terstruktur, dengan azas demokrasi, transparan, dan akuntabel.
4. Meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan.
5. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat dalam rangka menumbuhkan anggapan yang positif/ kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pengawasan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut ditetapkan 1 (satu) tujuan.

Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, kemana instansi hendak dibawa. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder*. Adapun visi pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan periode RPJMD 2018 – 2023 yaitu ***“Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing”***.

Visi di atas mengandung maksud bahwa semua komponen yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi dan kemampuannya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan bersih.

Untuk mendukung visi Kepala Daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan **Misi ke 4 (empat)** Bupati terpilih : ***Memperkuat Dan Memperluas Reformasi Birokrasi Yang Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Inovatif Bersih, Efektif, Akuntabel Dan Demokratis Yang Berbasis Pada Teknologi Informasi***.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mengacu pada Renstra 2018-2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategik menuju perbaikan kinerja sesuai fungsi organisasi untuk mencapai misi ke-4 Bupati Pasuruan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023. Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan yaitu ***“Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah”***. Dengan indikator kinerja :

1. Nilai SAKIP
2. Opini BPK

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Inspektorat Daerah berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten yang merupakan fungsi/bidang kewenangannya, maka sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan yaitu :

- 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 2. Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP
- 3. Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten sesuai fungsi/bidang kewenangannya, maka Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP PD Dengan Nilai Minimal BB
2. Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP	2. Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif
3. Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	3. Nilai SAKIP PD (Inspektorat Daerah)

3.3. Program dan Kegiatan

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2023 mempunyai 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah:
 - 1.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - 1.2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD.
- 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 1.3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - 1.3.3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - 1.4.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 1.4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 1.4.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 1.4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 1.4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - 1.5.1. Pengadaan Mebel;
 - 1.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 1.5.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 1.7.2. Pemeliharaan Mebel;
 - 1.7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 1.7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

- 2.1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal:
 - 2.1.1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - 2.1.2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 2.1.3. Reviu Laporan Kinerja;
 - 2.1.4. Reviu Laporan Keuangan;
 - 2.1.5. Pengawasan Desa;
 - 2.1.6. Kerjasama Pengawasan Internal;
 - 2.1.7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
- 2.2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:
 - 2.2.1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
 - 2.2.2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

- 3.1. Pendampingan dan Asistensi:
 - 3.1.1. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 - 3.1.2. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakkan Integritas.

3.3.1. INDIKATOR KINERJA

Sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan adalah :

- 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 2. Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP
- 3. Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Sasaran antara lain :

- 1. Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP PD Dengan Nilai Minimal BB
- 2. Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif
- 3. Nilai SAKIP PD (Inspektorat Daerah)

3.3.3. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran (Obrik Pemeriksaan) terdiri dari :

Kantor/Dinas/Badan	: 29
Bagian Sek. Daerah	: 9
RSUD	: 2
Kecamatan	: 24
Desa	: 11

Jumlah	: 75

3.3.4. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan di dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan.

3.3.5. Kebutuhan Dana Indikatif.

Kebutuhan dana Indikatif untuk melaksanakan Program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2023 seluruhnya berjumlah **Rp. 8.030.477.286,-.**

3.3.6. Sumber dana

Sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Pasuruan.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
60101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah	Inspektorat Daerah	100%	4.439.403.816	Dana APBD		100%	7.016.964.732
60101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi	Inspektorat Daerah	100%	59.760.800	Dana APBD		100%	113.014.000
6010120106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 laporan	Belanja : barang dan jasa 59.760.800			4 laporan	113.014.000
60101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan	Inspektorat Daerah	100%	3.425.689.876	Dana APBD		100%	5.518.748.672
6010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN		39 orang/bulan	Belanja : Pegawai 3.092.681.380			36 orang/bulan	5.188.436.100
6010120202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		13 dokumen	Belanja : barang dan jasa 266.048.496			13 dokumen	247.158.496
6010120203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 dokumen	Belanja : Pegawai 66.960.000			12 dokumen	83.154.076
60101205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian	Inspektorat Daerah	100%	95.274.050	Dana APBD		100%	316.112.760
6010120502	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		0 Paket	Belanja : barang dan jasa 0			1 Paket	23.002.760

6010120509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		50 Orang	Belanja : barang dan jasa	31.800.000			50 Orang	71.000.000
6010120511	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis/Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		50 Orang	Belanja : barang dan jasa	63.474.050			50 Orang	222.110.000
60101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum	Inspektorat Daerah	100%		457.166.130	Dana APBD		100%	450.498.300
6010120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		2 Paket	Belanja : barang dan jasa	26.471.280			2 Paket	30.916.720
6010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		8 Paket	Belanja : barang dan jasa	186.483.880			8 Paket	212.077.400
6010120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		2 Paket	Belanja : barang dan jasa	85.610.970			2 Paket	79.880.680
6010120606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan		12 Dokumen	Belanja : barang dan jasa	9.600.000			12 Dokumen	9.600.000
6010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		24 Laporan	Belanja : barang dan jasa	149.000.000			24 Laporan	118.023.500
60101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Inspektorat Daerah	100%		16.985.220			100%	73.700.000
6010120705	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		0 unit	Belanja : Modal	0			10 unit	24.200.000
6010120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		2 unit	Belanja : Modal	11.724.930			6 unit	49.500.000
6010120710	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang disediakan		1 unit	Belanja : Modal	5.260.290			0 unit	-

60101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang	Inspektorat Daerah	100%	122.515.440			100%	127.461.900
6010120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		12 Laporan	Belanja : barang dan jasa : 1.125.000			12 Laporan	2.010.000
6010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan		12 Laporan	Belanja : barang dan jasa : 121.390.440			12 Laporan	125.451.900
60101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan	Inspektorat Daerah	100%	262.012.300			100%	417.429.100
6010120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		15 Unit	Belanja : barang dan jasa : 228.421.600			15 Unit	294.698.400
6010120905	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara		0 Unit	Belanja : barang dan jasa : 0			0 Unit	-
6010120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		35 Unit	Belanja : barang dan jasa : 33.590.700			50 Unit	46.426.200
60101209009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		0 Unit	Belanja : barang dan jasa : 0			1 Unit	76.304.500
60102	PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN	Persentase LHP tepat waktu dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi	Pemda Kab. Pasuruan	87%	3.483.304.800			87%	3.846.735.480
60102201	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah LHP dan LHE tepat waktu dan tindak lanjut atas Rekomendasi	Pemda Kab. Pasuruan	87 Laporan	3.463.304.800			87 Laporan	3.789.920.480
6010220101	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja pemerintah daerah		1 Laporan	Belanja : barang dan jasa : 10.000.000			57 Laporan	81.100.000
6010220102	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah		87 Laporan	Belanja : Pegawai : 2.747.443.750			75 Laporan	2.915.922.500
6010220103	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja		1 Laporan	Belanja : barang dan jasa : 10.000.000			2 Laporan	55.800.000
6010220104	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan		57 Laporan	Belanja : barang dan jasa : 10.000.000			116 Laporan	45.700.000
6010220105	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan Desa		12 Laporan	Belanja : barang dan jasa : 5.000.000			24 Laporan	15.840.000

6010220106	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk		2 Kesepakatan	Belanja : barang dan jasa	675.861.050			1 Kesepakatan	655.867.980
6010220107	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		2 Dokumen	Belanja : barang dan jasa	5.000.000			5 Dokumen	19.690.000
60102202	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase terlaksananya pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pemda Kab. Pasuruan	100%	Belanja : barang dan jasa	20.000.000			100%	56.815.000
6010220201	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah Laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani		1 Laporan	Belanja : barang dan jasa	5.000.000			3 Laporan	19.690.000
6010220202	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu		3 Laporan	Belanja : barang dan jasa	15.000.000			6 Laporan	37.125.000
60103	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Terpenuhinya Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang memadai	Pemda Kab. Pasuruan	100%	Belanja : barang dan jasa	107.768.670			100%	27.225.000
60103202	Pendampingan dan Asistensi	Persentase LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	Pemda Kab. Pasuruan	80%	Belanja : barang dan jasa	107.768.670			80%	27.225.000
6010320202	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		57 perangkat daerah		95.268.670			57 perangkat daerah	14.850.000
6010320203	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penegakan Integritasi		4 perangkat daerah		12.500.000			1 perangkat daerah	12.375.000
					Total Belanja operasi : Belanja : Pegawai	Rp 5.840.125.130				
					Belanja : Barang dan Jasa	Rp 2.173.366.936				
					Belanja : Bunga	Rp -				
					Belanja : Subsidi	Rp -				
					Belanja : Hibah	Rp -				

					Belanja : Rp - Bantuan				
					Total : Rp 16.985.220 Belanja modal				
					Total : Rp - Belanja tidak terduga				
					Total Rp - Belanja transfer :				
					Total Rp 8.030.477.286 Belanja PD				

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan Rencana Kerja memperhatikan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai P-Renstra dan P-RPJMD. Dalam rangka memenuhi Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah, Peningkatan nilai SAKIP RB, ZI dan SPIP ada beberapa Program, Kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2023, yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2. PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN
 - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
 - a. Pendampingan dan Asistensi

Berdasarkan aturan Permendagri 27 Tahun 2021 bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan untuk Inspektorat Daerah berdasarkan besaran dari total belanja daerah dengan klasifikasi diatas 2 Trilyun paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah dan diatas 15 Milyar. Terkait hal tersebut diharapkan agar anggaran Inspektorat Daerah disesuaikan sehingga Inspektorat Daerah dapat menjadi lebih baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
60101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah	Inspektorat Daerah	100%	4.439.403.816
60101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi	Inspektorat Daerah	100%	59.760.800
6010120106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 laporan	59.760.800
60101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan	Inspektorat Daerah	100%	3.425.689.876
6010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN		39 orang/bulan	3.092.681.380
6010120202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		13 dokumen	266.048.496
6010120203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 dokumen	66.960.000
60101205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian	Inspektorat Daerah	100%	95.274.050
6010120502	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		0 Paket	0
6010120509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		3 Orang	31.800.000
6010120511	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis/Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		50 Orang	63.474.050
60101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum	Inspektorat Daerah	100%	457.166.130
6010120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		2 Paket	26.471.280

6010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		8 Paket	186.483.880
6010120605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		2 Paket	85.610.970
6010120606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan		12 Dokumen	9.600.000
6010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		24 Laporan	149.000.000
60101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Inspektorat Daerah	100%	16.985.220
6010120705	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		0 unit	0
6010120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		2 unit	11.724.930
6010120710	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang disediakan		1 unit	5.260.290
60101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang	Inspektorat Daerah	100%	122.515.440
6010120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		12 Laporan	1.125.000
6010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan		12 Laporan	121.390.440
60101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan	Inspektorat Daerah	100%	262.012.300
6010120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		15 Unit	228.421.600
6010120905	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara		0 Unit	0
6010120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		35 Unit	33.590.700
60101209009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		0 Unit	0
60102	PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN	Persentase LHP tepat waktu dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi	Pemda Kab. Pasuruan	87%	3.483.304.800
60102201	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah LHP dan LHE tepat waktu dan tindak lanjut atas Rekomendasi	Pemda Kab. Pasuruan	87 Laporan	3.463.304.800
6010220101	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja pemerintah daerah		1 Laporan	10.000.000

6010220102	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah		87 Laporan	2.747.443.750
6010220103	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja		1 Laporan	10.000.000
6010220104	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan		57 Laporan	10.000.000
6010220105	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan Desa		12 Laporan	5.000.000
6010220106	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk		2 Kesepakatan	675.861.050
6010220107	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		2 Dokumen	5.000.000
60102202	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase terlaksananya pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pemda Kab. Pasuruan	100%	20.000.000
6010220201	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah Laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani		1 Laporan	5.000.000
6010220202	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu		3 Laporan	15.000.000
60103	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Terpenuhinya Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang memadai	Pemda Kab. Pasuruan	100%	107.768.670
60103202	Pendampingan dan Asistensi	Persentase LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	Pemda Kab. Pasuruan	80%	107.768.670
6010320202	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		57 perangkat daerah	95.268.670
6010320203	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penegakan Integritasi		4 perangkat daerah	12.500.000
					8.030.477.286

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan yang telah disusun ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama Tahun 2023. Selain itu Rencana Kerja Tahun 2023 akan dijadikan dasar evaluasi dalam pelaksanaan laporan atas kinerja tahunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan, kualitas perencanaan menentukan terhadap tercapainya tujuan dan sasaran.

Untuk mewujudkan Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan tersebut, diperlukan Rencana kerja yang mempunyai batas waktu dan terukur target kinerjanya. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Inspektorat Kabupaten Pasuruan telah membuat Rencana Kerja untuk tahun 2023 yang mencakup, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dijadikan pedoman/acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan

Dengan adanya rencana kerja ini diharapkan pada tahun 2023 akan ada landasan dan arah yang jelas bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sehingga mampu mengurangi atau meminimalkan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Pasuruan, 20 Juli 2022

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PASURUAN



drh. IRIANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630131 198903 1 010

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan yang telah disusun ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama Tahun 2023. Selain itu Rencana Kerja Tahun 2023 akan dijadikan dasar evaluasi dalam pelaksanaan laporan atas kinerja tahunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan, kualitas perencanaan menentukan terhadap tercapainya tujuan dan sasaran.

Untuk mewujudkan Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan tersebut, diperlukan Rencana kerja yang mempunyai batas waktu dan terukur target kinerjanya. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Inspektorat Kabupaten Pasuruan telah membuat Rencana Kerja untuk tahun 2023 yang mencakup, Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dijadikan pedoman/acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan adanya rencana kerja ini diharapkan pada tahun 2023 akan ada landasan dan arah yang jelas bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sehingga mampu mengurangi atau meminimalkan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

TELAH DITELITI		
Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekretaris Daerah		
Asisten PKR		
Kepala Bappelitbangda		
Inspektur Daerah		
Kabag. Hukum		
Sekretaris Inspektorat Daerah		
Kabid. PPM Bappelitbangda		

BUPATI PASURUAN

M. IRSYAD YUSUF